

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik agraria di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, yang melibatkan Kelompok Tani Karya Makmur, Perum Perhutani, dan pemerintah, terkait klaim kepemilikan tanah timbul hasil sedimentasi sejak 1980. Ketidakjelasan status hukum tanah yang dikelola ±494,49 Ha oleh 1.690 KK petani memicu perjuangan kolektif kelompok tani untuk memperoleh hak kepemilikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan komunikasi kelompok tani dalam memperjuangkan hak atas tanah, meliputi interaksi sosial yang membangun kesadaran bersama, pemenuhan klaim kebenaran, ketepatan, kejujuran, dan kejelasan, penggunaan bahasa untuk kesepahaman, serta praktik dialog rasional dalam negosiasi dengan pihak terkait. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas, yang menekankan pentingnya komunikasi rasional, terbuka, dan setara untuk mencapai kesepahaman. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Tani Karya Makmur mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal yang terstruktur, memanfaatkan forum musyawarah, negosiasi, dan pengajuan proposal resmi kepada Kementerian ATR/BPN. Hambatan utama berasal dari lambatnya respons pemerintah, ketidakjelasan batas wilayah dari Perhutani, dan perbedaan pemahaman di internal kelompok. Meskipun keputusan kepemilikan tanah belum dicapai, komunikasi yang terbangun berhasil memupuk solidaritas anggota, memperkuat posisi tawar kelompok tani, dan menjaga kesinambungan perjuangan sejak 1980 hingga kini.

Kata kunci: komunikasi kelompok, tindakan komunikatif, konflik agraria, kepemilikan tanah, Kelompok Tani Karya Makmur.

ABSTRACT

This research is based on an agrarian conflict in Bulupayung Village, Patimuan Subdistrict, Cilacap Regency, involving the Karya Makmur Farmer Group, Perum Perhutani, and the government, regarding land ownership claims over newly emerged land from sedimentation since 1980. The unclear legal status of approximately 494.49 hectares of land cultivated by 1,690 farming households has driven the collective struggle of the farmer group to obtain ownership rights. This study aims to analyze the role of the farmer group's communication in advocating for land rights, including social interaction to build collective awareness, fulfilling claims of truth, accuracy, honesty, and clarity, the use of language to achieve mutual understanding, and the practice of rational dialogue in negotiations with stakeholders. The theoretical framework is based on Jurgen Habermas's Theory of Communicative Action, emphasizing rational, open, and equal communication to reach mutual understanding. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and data validity tested using source triangulation. The findings indicate that the Karya Makmur Farmer Group developed structured internal and external communication strategies, utilizing deliberative forums, negotiations, and formal proposal submissions to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The main obstacles were the government's slow response, the unclear boundary demarcation from Perhutani, and differences in understanding within the group. Although land ownership has yet to be granted, the established communication has fostered member solidarity, strengthened the group's bargaining position, and sustained their struggle from 1980 to the present.

Keywords: group communication, communicative action, agrarian conflict, land ownership, Karya Makmur Farmer Group.